

PENDIDIKAN KARAKTER;
FUNGSI UTAMA REVOLUSI MENTAL ANAK BANGSA

Samlan Ahmad
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ternate
Jl Dufa-dufa Pantai Ternate Maluku Utara
e-mail: samlan69@yahoo.com

Abstract

Talking about the concept of character education, it further needs to use two different approaches, when looking at the consequences of each action, in the term of cultural anthropology, this is called shame culture and guilt culture. Bung Karno interpreted Mental Revolution is, nothing but, a movement to galvanize human of Indonesia to become a new man, with a white heart, steel-willed, eagle-spirited, fire-soul, with ultimate aspiration to save the nation and the state, especially in nation building, with all the dangers and temptations. Mental revolution appears to offer solutions through a variety of policies in all sectors of life including education in order to knit the social order into a process of human development that is more vibrant and cultured.

Keywords: character education, curriculum, and mental revolution

A. Konsep Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter atau lebih dikenal dengan istilah *character education* menjadi tema populer dalam revolusi mental. Pada tanggal 21 Mei Menteri Pendidikan Nasional mendeklarasikan dimulainya pendidikan karakter bangsa. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa langkah ini sekaligus menandai bangkitnya era baru seorang Menteri Pendidikan yang hendak menjadikan pembangunan karakter sebagai fokus dan tujuan pendidikan nasional. Pencanangan ini disambut dengan antusias oleh masyarakat luas karena sudah terlalu lama merindukan terciptanya suasana kehidupan yang aman, tertib dan damai. Institusi pendidikan dan lembaga sosial lainnya memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan harapan yang sama melalui gerakan revolusi mental yang terus digelorakan.

Kegagalan pendidikan di Indonesia menghasilkan manusia yang berkarakter diperkuat oleh I Ketut Sumarta dalam tulisannya yang berjudul "Pendidikan yang Memekarkan Rasa". Dalam tulisan tersebut

Ketut Sumarta mengungkapkan bahwa pendidikan nasional kita cenderung hanya menonjolkan pembentukan kecerdasan berpikir dan menepikan penempatan kecerdasan rasa, kecerdasan budi, bahkan kecerdasan batin. Dari sini lahirlah manusia-manusia yang berotak pintar, manusia yang berprestasi secara kuantitatif akademik, tetapi tidak berkecerdasan budi.

Dalam dunia pendidikan, terdapat tiga ranah yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, ranah afektif berkaitan dengan (sikap) *attitude*, moralitas, spirit, dan karakter, sedangkan ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan bersifat prosedural dan cenderung mekanis. Dalam realitas pembelajaran di sekolah, usaha untuk menyeimbangkan ketiga ranah tersebut memang selalu diupayakan, tetapi pada kenyataannya yang dominan adalah ranah kognitif, kemudian psikomotorik. Akibatnya adalah peserta didik kaya akan kemampuan bersifat *hard skill*, tetapi miskin *soft skill* karena ranah afektif terabaikan. Gejala ini tampak pada *output* pendidikan yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, pintar, juara kelas, tetapi miskin kemampuan membangun relasi, kurang mampu berinteraksi dan bekerjasama, cenderung egois serta menjadi pribadi yang tertutup.

Sebenarnya dalam perspektif kesejarahan, pendidikan karakter bukan merupakan hal baru. Karena pasca kemerdekaan sejak masa orde lama, orde baru dan orde reformasi sudah dilaksanakan meski dikenal dengan nama serta bentuk yang berbeda. Dimasa orde baru misalnya, kurikulum pendidikan karakter diberikan kepada siswa melalui mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, PMP, dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Kemudian untuk pemantapan wawasan kebangsaan bagi siswa baru setiap sekolah melaksanakan Penataran P4. Pendidikan karakter ini juga diperluas melalui kegiatan penataran yang sama dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat agar pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat dihayati dan diamalkan.

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdikbud adalah “bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku,

personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak.¹ Istilah karakter juga dapat ditelusuri dalam bahasa Yunani yang berarti “*to mark*” atau menandai dan memfokuskan tata cara mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sebab itu, karakter yang baik mencerminkan sikap individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya yang ditandai dengan nilai-nilai, seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggungjawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, dan pemberani.

Sokrates sebagaimana yang dikutip oleh K. Bertens, mengatakan bahwa orang yang mempunyai pengetahuan tentang yang baik tentu akan berusaha untuk mengaplikasikan, sebaliknya orang yang berbuat jahat karena ketidaktahuan mengenai sesuatu yang baik.² Thomas Lickona dalam Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, menjelaskan bahwa karakter mulia (*good character*) meliputi pengetahuan tentang kebaikan, timbul komitmen (niat) terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan.³ Dengan kata lain, karakter dapat dimaknai sebagai manifestasi pengetahuan (*cognitives*), sikap (*attitude*), motivasi (*motivation*), perilaku (*behaviors*) dan keterampilan (*skills*).

Namun pandangan ini seringkali kontra produktif dengan realitas kehidupan, betapa banyak orang berilmu tetapi gagal menampilkan perilaku yang sesuai ajaran agama dan norma-norma kebaikan. Jadi antara kapasitas keilmuan dan tingkat pendidikan yang dimiliki relatif tidak berbanding lurus dengan perbuatan baik yang dilakukan. Kecenderungan manusia untuk bertindak adalah wujud dari ekspresi kejiwaan dan kebebasan hidup. Hanya saja jika tidak dikendalikan dengan akal sehat berdasarkan norma-norma

¹Hamdani dan Beni Ahmad Saebani, *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam*, (Bandung; Pustaka Setia, 2013), h. 30

² K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 28

³ Hamdani dan Beni Ahmad Saebani, *Pendidikan Karakter*, h. 31

kebaikan yang dianut, maka sifat manusia akan cenderung berbuat kejahatan. Apalagi dalam kehidupan masyarakat modern, dimana tingkat peradabannya sudah jauh lebih maju dan sangat terbuka menerima perubahan, perilaku sosial mengalami proses pergulatan yang luar biasa karena menghadapi kebutuhan dan tuntutan hidup yang semakin kompleks. Berbeda dengan kondisi masyarakat tradisional yang homogen dan serba tertutup, sikap apologi mereka terhadap norma agama dan budaya praktis tidak pernah dipersoalkan. Dengan keadaan seperti ini secara otomatis siapapun dia harus tunduk kepada nilai dan norma yang berlaku.

Ada pembelajaran menarik dari kisah seorang ulama besar Buya Hamka, ketika memberi pengajian di sebuah majelis. Secara tiba-tiba diberondong dengan pertanyaan nakal seorang pemuda yang hadir dalam pengajian itu. Buya boleh saya memandangi gambar atau foto wanita bugil, semata-mata hanya untuk mentafakuri kebesaran dan keagungan ciptaan Tuhan yang ada pada keindahan tubuh wanita tersebut? Tentu Buya kaget, karena pertanyaan ini benar-benar muncul di luar dugaan. Buya Hamka sempat merenung sebentar, tak lama kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Baginya, “boleh”. Tetapi segera memberikan penegasan, bahwa pandangan itu hanya semata-mata bertujuan mengagumi betapa indahnya hasil ciptaan Tuhan, tanpa berpretensi lain dari itu. Sekali hatimu melenceng menjadi nafsu, saat itu haram.⁴

Terlepas dari benar atau tidak cerita tersebut, tetapi jawaban seorang Buya memadukan cara pandang etika, estetika dan kebutuhan spritual dengan pendekatan sufistik. Karena dalam tasawuf memang tidak ada batasan, segala sesuatu bisa menjadi obyek zikir. Kalau menggunakan hukum syariah, boleh jadi tidak dibenarkan karena memandangi aurat dan dianggap sebagai perbuatan dosa. Sementara pada tataran normatif sama sekali

4 Moeflich Hasbullah, *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 256

tidak memperdebatkan soal hakikat atau jauh dari jangkauan formalitas, tidak peduli bahwa di luar norma ternyata ada jalan menuju Tuhan. Esensi pertanyaan remaja tersebut harus dibahas dalam wilayah estetika, tetapi jangan lepas dari norma atau hukum.

Norma diharapkan mampu berfungsi meng-*guide* atau mengontrol estetika, meski diakui ini masalah rumit tidak sederhana yang kita pikirkan. Karena seni menyangkut aktivitas rasa bukan untuk dihukumi, melainkan harus dirasakan. Hukum berorientasi pada haram atau tidak suatu perbuatan, sedangkan estetika bersumber dari nilai rasa dan karsa. Namun bila ekspresi rasa atau seni itu merugikan orang lain baik secara moril maupun meteril maka hukum harus ditegakkan. Tuhan itu Maha Indah dan menjadi sumber segala keindahan. Pengalaman estetis apapun bentuknya berasal dari Tuhan, sebab Tuhan adalah Seniman Yang Mahasempurna.⁵

Untuk memahami pendidikan karakter lebih jauh perlu digunakan dua pola pendekatan yang berbeda ketika melihat akibat setiap perbuatan. Dalam antropologi budaya disebut *shame culture* dan *guilt culture*, atau kebudayaan malu dan kebudayaan kebersalahan. *Shame culture* menjelaskan bahwa seluruh perilaku manusia ditandai oleh rasa malu bukan rasa bersalah. Sebaliknya *guilt culture* terdapat rasa bersalah apabila perbuatan itu dilakukan. *Shame culture* adalah bentuk kebudayaan yang bersifat simbolik sehingga akrab dengan beberapa istilah seperti hormat, reputasi, nama baik, status, dan gengsi. Apabila kita melakukan kejahatan, perbuatan ini bukan hanya dilihat sebagai sesuatu yang buruk begitu saja, tetapi harus ditutupi atau disembunyikan agar orang lain tidak mengetahui sehingga pelaku jangan sampai merasa malu. Dalam *shame culture* sanksi itu datang dari luar karena dikecam dan dihujat oleh masyarakat, bahkan ini yang paling ditakuti mereka.

5 Moeflich Hasbullah, *Sejarah Sosial Intelektual Islam*, h. 257

Demikian pula sebaliknya, *guilt culture* adalah kebudayaan dimana kita selalu merasa bersalah dan dosa bila perbuatan yang dilakukan itu justru menimbulkan petaka bagi orang lain. Budaya berbuat salah sangat penting dan begitu berarti bagi manusia. Sekecil apapun kesalahan yang diperbuat, walaupun tanpa diketahui orang lain maka sepanjang itu pula dia masih tetap merasa berdosa. Perasaan bersalah membuat kita menyesal dan tidak tenang atas perbuatan itu sendiri, bukan karena takut dicela atau dikutuk orang lain. Pelaku tidak mendapat sanksi sosial dari luar, melainkan datang dari hati nuraninya sendiri.

Manusia memang membutuhkan perubahan kearah hidup yang lebih baik. Dalam proses perubahan seringkali menawarkan pilihan, sehingga orang dituntut kemampuan dan kearifan diri untuk dapat beradaptasi dengan pilihan perubahan itu sepanjang tidak menabrak norma. Merton menulis. bahwa adaptasi untuk kepentingan perubahan berpeluang terjadi penyimpangan karena mengabaikan tujuan cultural dan norma institusional.⁶ Orang harus bisa membedakan bentuk perilaku baru yang benar menurut norma yang telah ditentukan dan bentuk perilaku baru yang berada di luar norma itu. Kluckhohn menyebut yang pertama sebagai “variasi tindakan” dan yang kedua adalah “perilaku menyimpang”.⁷

Perubahan sikap merupakan salah satu elemen terpenting yang menjadi target atau sasaran dalam konsep pendidikan karakter. Bentuk perubahan yang diharapkan adalah bagaimana menjadikan sosok kepribadian siswa berprestasi secara intelektual dan berbudaya dari sisi moral, sehingga dapat menjadi insan kamil.⁸ Sosok insane kamil menggambarkan kesempurnaan manusia yang mampu membangun keseimbangan antara tuntutan jasmani dan rohani, rasa dan rasio, serta memiliki etika relegius.

6 Piotr Sztompka, *The Sociology of Change*, diterjemahkan oleh Alimandan dengan judul *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta; Prenada Media, 2004), h. 295

7 Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, h. 295

Disinilah guru berperan menjadi ujung tombak pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, agar siswa terus termotivasi untuk mengejar prestasi belajar setinggi mungkin dan mereka pantas bangga atas apa yang telah dicapai tanpa harus bersikap sombong.

B. Revolusi Mental

Revolusi (dari bahasa latin *revolutio*, yang berarti “berputar arah”) adalah perubahan *fundamental* (mendasar) dalam struktur kekuatan atau organisasi yang terjadi dalam periode waktu yang relatif singkat. Kata kuncinya adalah *Perubahan dalam Waktu Singkat*. Revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat baik pemerintah atau rakyat dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategi yang diperlukan oleh bangsa dan negara sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Revolusi mental mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Mendengar kata revolusi mental, bukanlah hal baru bagi bangsa Indonesia, karena sebelumnya presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno telah mencetuskan ini. Namun, belakangan ini kata revolusi mental tengah hangat menjadi topik pembicaraan. Karena kata revolusi mental ini menjadi jargon atau program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita pada poin ke delapan (8). Nawa Cita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, *nawa* (sembilan) dan *cita* (harapan, agenda, keinginan).

8 Armai Arief, *Reformasi Pendidikan Islam*, (Jakarta; CRSD Press, 2005), h. 82

Moralitas menjadi longgar. Sesuatu yang dulu dianggap tabu, sekarang menjadi biasa-biasa saja. Cara berpakaian, berinteraksi dengan lawan jenis, menikmati hiburan di tempat-tempat spesial dan menikmati narkoba menjadi trend dunia modern yang sulit ditanggulangi. Globalisasi menyediakan seluruh fasilitas yang dibutuhkan manusia, positif maupun negatif. Banyak manusia terlena dengan menuruti semua keinginannya, apalagi memiliki rizki melimpah dan lingkungan kondusif. Akhirnya, karakter bangsa berubah menjadi rapuh, mudah diterjang ombak, terjerumus dalam trend budaya yang kebarat-baratan. Prinsip-prinsip moral, budaya bangsa, dan perjuangan hilang dari karakteristik mereka. Inilah yang menyebabkan dekadensi moral serta hilangnya kreativitas dan produktivitas bangsa. Sebab, ketika karakter suatu bangsa rapuh maka semangat berkreasi dan berinovasi dalam kompetensi yang kekat akan mengendur, dan mudah dikalahkan oleh semangat konsumerisme, hedonisme, dan lain-lain.

Pembangunan manusia melingkupi 3 dimensi, yaitu; sehat, cerdas, dan berkepribadian. Sehat berarti dimulai dengan fisik kita yang senantiasa kondusif dan bugar. Cerdas berarti mengarah pada otak kita yang selalu berpikir dan diasah sehingga memiliki kemampuan analisis dan berkualitas. Sedangkan berkepribadian adalah kaitannya dengan kehendak yang berbudi pekerti luhur. Perlunya revolusi mental adalah karena penyakit seperti emosi/mental/jiwa akan berdampak pada individu berupa malasnya seseorang dan tidak mempunyai karakter. Kemudian dampaknya akan menular kepada masyarakat yang ditandai dengan gangguan ketertiban, keamanan, kenyamanan, kecemburuan sosial, dan ketimpangan sosial. Lebih jauh lagi, akan berdampak negatif pada bangsa dan negara. Bangsa kita akan lemah dan menjadi tidak bermartabat. Kemudian produktivitas dan daya saing kita menjadi rendah

Tulisan ini mencoba mereview kembali gagasan revolusi mental yang dicetuskan oleh Presiden RI Joko Widodo, dan mendapat respon positif dikalangan publik. Gagasan tersebut kemudian melandasi paradigma baru dalam pembangunan karakter bangsa (*nation character building*). Karena pendidikan selama ini dinilai gagal meletakkan nilai-nilai moral dan etika dalam mengembangkan kemampuan mental yang kuat sebagai dasar pijakan bagi peserta didik dalam menjalani kehidupan. Padahal untuk membangun kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan harus dimulai dari perubahan perilaku yang menjadi pusat *episentrum* revolusi mental.

Sejak Indonesia mengalami krisis terutama pasca reformasi tahun 1998, nilai-nilai kesopanan, kesantunan, toleransi, menghargai perbedaan agama, suku dan bahasa berubah menjadi kekerasan. Fenomena kekerasan dan perilaku dekadensi moral lainnya hampir terjadi di mana-mana, mulai dari tawuran antar siswa, geng motor, perkelahian antar kampung, pembunuhan, perampokan, penggunaan narkoba, sampai kepada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terus menggerogoti sistem birokrasi pemerintahan.

Kenyataan yang kontra produktif itu memang secara akal sehat (*common sence*) mungkin sulit diterima karena Indonesia selain sebagai bangsa yang beragama, juga terkenal sangat kuat memiliki keluhuran nilai-nilai budaya. Pancasila yang selama ini dijadikan falsafah hidup bangsa dengan somboyan Bineka Tunggal Ika, terbukti gagal memperkuat kohesi sosial untuk menjamin ketentraman dan kedamaian hidup bagi masyarakat. Nilai-nilai Pancasila yang selama ini berfungsi sebagai ideologi negara dan alat pemersatu bangsa justru benar-benar teruji kesaktiannya. Apakah masih mampu bertahan di tengah pertarungan ideologi global dan menjadi sumber ajaran moral dalam mencerdaskan

bangsa. Sementara dunia pendidikan nasional, dalam 10 tahun terakhir semakin kehilangan orientasi karena sudah terlalu lama membangun kecerdasan inteligensi dan mengabaikan potensi kecerdasan lain yang justru jauh lebih penting daripada sekedar menciptakan manusia pintar.

Revolusi mental muncul menawarkan solusi melalui kurikulum pendidikan 2013 untuk merajut kembali tatanan kehidupan sosial ke dalam suatu proses pembangunan manusia yang lebih berkarakter dan berbudaya. Untuk menata kembali arah kebijakan pendidikan Indonesia yang diinginkan ke depan, maka diperlukan keterlibatan semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan orang tua termasuk *stakeholder* dalam mengawasi pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai karakter di sekolah. Berbagai persoalan yang terjadi di sekolah terkait dengan perkembangan kepribadian siswa agar dibuka akses informasi sehingga bisa diketahui publik. Dalam konteks tersebut keberadaan wadah dewan pendidikan dan komite sekolah menjadi penting, karena merupakan representasi dari aspirasi publik untuk mengembangkan fungsi pengawasan.

Sistem pengawasan terhadap seluruh proses pembelajaran di sekolah tidak sebatas mengungkapkan hasil belajar siswa secara akademik, tetapi yang lebih utama adalah aspek perkembangan perilaku dalam lingkungan sekolah. Ini berarti bahwa tanggungjawab siswa tidak hanya terbatas di sekolah saja, melainkan sudah melibatkan partisipasi publik. Langkah ini dilakukan karena mengingat keberadaan anak di sekolah waktunya terlalu singkat, rata-rata antara 7-8 jam. Sementara waktu yang lebih banyak justru mereka kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Selama ini memang disadari bahwa hubungan komunikasi antara sekolah, orang tua dan masyarakat mengalami kesenjangan atau tidak terjalin dengan baik, sehingga apa yang sedang dan telah diperbuat anak di rumah atau di lingkungan masyarakat hampir tidak terpantau oleh guru di sekolah. Sebaliknya perilaku anak yang seringkali menimbulkan kegaduhan tertentu, membuat pelanggaran baik yang bersifat ringan maupun pelanggaran berat tetap dikenakan sanksi oleh guru berdasarkan tata tertib sekolah. Untuk kasus yang dianggap sebagai kategori pelanggaran berat berupa perbuatan mencuri, berjinah, berkelahi, terlibat minuman keras, dan narkoba, maka orangtua selalu dipanggil dan disampaikan, bahkan pihak sekolah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas apakah berupa skorsing atau pemberhentian.

Wujud pendidikan karakter adalah membentuk etos bukanlah pembicaraan teori-teori etika yang abstrak, tetapi bagaimana membuat teori-teori tersebut mempengaruhi tindakan siswa sehari-hari. Pendidikan diarahkan untuk menuju transformasi pada tataran kebiasaan dan budaya. Dimana pola interaksi pembelajaran senantiasa mengajarkan keutamaan (*virtue*) moral dan etika ke dalam bentuk pengetahuan yang lebih praktis, sehingga siswa mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan sosial masa kini. Sebab inti revolusi mental pendidikan karakter di sekolah, diharapkan dapat melahirkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, demokratis, kebersamaan, dan mengembangkan kesadaran sikap saling menghargai perbedaan dengan semangat kebinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, revolusi mental juga harus dimaknai sebagai proses melibatkan semacam strategi kebudayaan untuk melakukan transformasi etos agar terjadi perubahan mendasar dalam mentalitas yang meliputi cara berpikir, bertindak, cara

merasa, cara mempercayai yang semuanya ini menjelma dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Pendidikan formal melalui sekolah dapat menjadi lokus untuk memulai revolusi mental dan diarahkan pada pembentukan etos warga negara (*citizenship*). Proses pedagogis membuat etos warga negara ini tumbuh dan berkembang secara natural atau dapat diekspresikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Cara mendidik perlu dirubah pendekatan dari pengetahuan diskursif (*discursive knowlegde*) ke pengetahuan praktis (*practical knowledge*).

C. Pendidikan Karakter dalam Sistem Pembelajaran

Hasil penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas sekolah ditemukan adalah: (1) iklim sekolah yang kondusif untuk belajar, (2) adanya harapan dan keyakinan guru bahwa semua siswa dapat berprestasi, (3) penekanan pada kemampuan dasar (*basic skills*) dan tingkat *time on task* siswa maksimal, (4) sistem instruksional pembelajaran yang mempunyai keterkaitan jelas antara tujuan, pemantauan dan *assessment*-nya, dan (5) kepemimpinan kepala sekolah yang memberi insentif untuk pelajaran.⁹ Kelima faktor ini menjadi indikator yang paling berpengaruh untuk meningkatkan kinerja guru dalam mengelola efektivitas sekolah.

Sistem pendidikan kita dinilai tidak mampu mengembangkan kepribadian siswa yang utuh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan global. Padahal seharusnya tujuan pendidikan yang hendak dicapai adalah bagaimana membentuk karakter manusia terpuji, kritis, memiliki kepekaan, mandiri, tangguh, dan terampil mengelola perubahan baik secara personal maupun sosial. Meskipun diakui bukan pekerjaan yang mudah

⁹ Damiyati Zuchdi, et. al, *Model Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran dan Pengembangan Kultur Sekolah*, (Yogyakarta; 2013), h.

ditempuh tetapi memerlukan komitmen dan keseriusan pemerintah dengan dukungan seluruh komponen masyarakat untuk memprioritaskan tujuan penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam membangun karakter bangsa.

Kondisi ini disatu sisi membuat posisi tawar pendidikan sangat lemah dalam kerangka menghasilkan kualitas sumber daya manusia. Sementara disisi lain tuntutan perubahan kurikulum dari tahun ke tahun semakin menambah beban belajar bagi siswa di sekolah. Akibatnya pendidikan seperti kehilangan momentum dalam mengembangkan efektivitas proses pembelajaran untuk mensinergikan kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memberikan dampak nyata bagi siswa dalam menjalani kehidupan. Sedangkan dikalangan guru sendiri seringkali mengalami kesulitan karena setiap saat terjadi perubahan kurikulum yang terasa begitu berat dan banyak membebani pekerjaan mereka, terutama terkait dengan persiapan administrasi sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Kurikulum pendidikan nasional selama ini memiliki kelemahan, karena tidak mendisain secara eksplisit proses pembelajaran yang mengharuskan kemampuan seorang guru menjabarkan materi pelajaran untuk mengkorelasikan aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan secara terintegrasi dalam membentuk karakter. Pada masa lalu, pemerintah pernah menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), semua mata pelajaran lebih fokus membentuk kecerdasan inteligensi tanpa memperhatikan keseimbangan kebutuhan nilai-nilai moral yang harus dimiliki siswa. Masing-masing mata pelajaran berdiri sendiri dan guru tidak menjelaskan bagaimana pentingnya fungsi ilmu pengetahuan terhadap pembentukan karakter. Terkecuali dalam beberapa mata pelajaran seperti Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dan PPKn. Tetapi itu pun nilai-nilai pendidikan karakter belum didesain melalui perangkat pembelajaran yang lebih konkrit

sehingga tampak masih berorientasi kepada pembentukan kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep pengetahuan yang abstrak.

Paradigma pembelajaran telah memberikan tugas dan tanggungjawab secara kolektif, semua guru terlibat langsung untuk membina, membimbing serta mengarahkan perilaku siswa dengan nilai-nilai moral, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun tradisi dan budaya yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Guru dituntut memiliki kemampuan profesionalitas agar selalu berkreasi untuk mengembangkan strategi, taktik dan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga bukan saja menarik perhatian siswa, tetapi juga dapat mempengaruhi proses pembentukan watak kepribadiannya.¹⁰ Inovasi model pembelajaran pendidikan karakter disesuaikan dengan sifat mata pelajaran masing-masing. Misalnya Bahasa Indonesia, pembelajaran lebih berorientasi pada keterampilan dan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Sebab bahasa adalah simbol komunikasi yang syarat dengan karakter budaya. Bagaimana kemampuan siswa mengeskpresikan gaya berbahasa yang santun, sopan, lemah-lembut dan penuh rasa hormat terhadap lawan bicara yang seusia, di bawah usia atau lebih tua usianya.

James O. Whittaker dalam bukunya Annurrahman, mengatakan bahwa belajar adalah proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui pelatihan atau pengalaman.¹¹ Belajar berfungsi memberikan pengalaman agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh membuat siswa menemukan keseimbangan hidup dalam berperilaku baik secara individu maupun sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai moral yang terdapat

¹⁰ Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta; Paramadina, 2003), h. 104

¹¹ Aunurrahman, *Belajar dan Pembelajaran*, (Bandung; Alfabeta, 2012), h. 34

pada setiap mata pelajaran diharapkan dapat mempengaruhi dan menumbuhkan budaya berperilaku yang baik tanpa harus membeda-bedakan kepada siapa perbuatan baik itu dilakukan. Guru berkewajiban untuk membimbing dan mengarahkan siswa dari hal-hal yang belum diketahui, terutama yang berhubungan dengan kondisi lingkungan kehidupan sekitarnya.¹²

Nilai-nilai pendidikan karakter pada semua mata pelajaran yang diajarkan harus dapat dipraktekkan oleh siswa. Misalnya mata pelajaran Pendidikan Agama diberikan penekanan bukan lagi dari sisi pembentukan kompetensi pengetahuan agama, tetapi lebih fokus pada bagaimana membangun kesadaran, penghayatan dan pengamalan dengan budaya berperilaku keagamaan yang benar. Sehingga nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam ajaran agama mampu diaplikasikan oleh siswa. Bagaiman agama mengajarkan sikap disiplin, menjaga kebersihan, sabar, kepedulian sosial, kebersamaan, toleransi, memiliki motivasi belajar yang tinggi, jujur, adil, dan bertanggungjawab.

Pendidikan karakter yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama tersebut selama ini kurang diperhatikan, sehingga antara pengetahuan agama dan perilaku beragama yang dimiliki siswa mengalami kesenjangan yang luar biasa. Tujuan pembelajaran pendidikan agama di sekolah hendak diletakkan secara proporsional dengan pendekatan pemahaman yang lebih komprehensif. Agama bukan dogma yang kaku, sehingga konteks pembicaraan jangan hanya sebatas pahala dan dosa, surga dan neraka berdasarkan hukum-hukum syariah. Padahal substansi agama itu jauh lebih penting yang harus diamankan agar manusia mampu mengatur tatanan kehidupan dalam berbagai aspek pembangunan baik ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Pemahaman substantif terhadap ajaran agama inilah yang patut dikedepankan, bukan lagi agama aliran. Karena itu

12 Damiyati Zuchdi, et. al, *Model Pendidikan Karakter Terintegrasi*, h. 51

bertentangan dengan konsep Islam sebagai ajaran universal yang mengajarkan nilai-nilai perdamaian, kebersamaan, persatuan, persaudaraan, kebebasan dan perbedaan. Tidak boleh lagi siswa diajarkan cara pemahaman agama yang keliru, menggunakan simbol-simbol agama untuk melegitimasi kekerasan, menyebarkan isu-isu sesat dalam menciptakan konflik bernuansa SARA. Semua bentuk perilaku keagamaan mereka, diarahkan dengan sikap lebih terbuka untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Sebab perbedaan adalah kodrat Tuhan yang harus disyukuri, bukan keinginan manusia yang penuh dengan sifat egoisme dan merasa dirinya yang paling benar.

Selain pendidikan agama, pada semua mata pelajaran yang lain juga perlu dikembangkan pendekatan lebih terintegrasi agar implikasi dari ilmu pengetahuan dapat membentuk watak dan karakter siswa. Dengan demikian, tugas dan tanggungjawab tidak boleh dibebankan kepada guru agama semata, seperti yang dilakukan selama ini. Guru agama adalah tameng yang setiap saat siap menghadapi serangan apabila siswa berbuat salah. Berbagai kasus atau pelanggaran dilakukan siswa guru agama berfungsi sebagai bengkel reparasi moral dengan menggunakan sejumlah jurus kesaktian untuk dapat memulihkan kembali kondisi siswa menjadi orang yang memiliki karakter mulia.

D. Penutup

Sejak Indonesia mengalami krisis terutama pasca reformasi tahun 1998, nilai-nilai kesopanan, kesantunan, toleransi, menghargai perbedaan agama, suku dan bahasa berubah menjadi kekerasan. Fenomena kekerasan dan perilaku dekadensi moral lainnya hampir terjadi dimana-mana, mulai dari tawuran antar siswa, geng motor, perkelahian antar kampung, pembunuhan, perampokan, penggunaan narkoba, sampai kepada praktek

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terus menggerogoti sistem birokrasi pemerintahan.

Dalam perspektif kesejarahan, pendidikan karakter bukan merupakan hal baru. Karena pasca kemerdekaan sejak masa orde lama, orde baru dan orde reformasi sudah dilaksanakan, meski dikenal dengan nama serta bentuk yang berbeda. Dimasa orde baru misalnya kurikulum pendidikan karakter diberikan kepada siswa melalui mata pelajaran agama, Bahasa Indonesia, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

DAFATAR PUSTAKA

Armai, Arief, *Reformasi Pendidikan Islam*, Jakarta; CRSD Press, 2005

Aunurrahman, *Belajar dan Pembelajaran*, Bandung; Alfabeta, 2012

Hamdani dan Beni Ahmad Saebani, *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam*, Bandung; Pustaka Setia, 2013

Bertens, K., *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001

- Hasbullah, Moeflich, *Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia*,
(Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Sztompka, Piotr, *The Sociology of Change*, diterjemahkan oleh
Alimandan dengan judul; *Sosiologi Perubahan Sosial*,
Jakarta; Prenada Media, 2004
- Zuchdi, Damiyati, et-al, *Model Pendidikan Karakter Terintegrasi
dalam Pembelajaran dan Pengembangan Kultur Sekolah*,
Yogyakarta; 2013